

## Kebijakan Antara Van Den Bosch Dengan Thomas Stamford Raffles

Rizki Fadilla Sambas<sup>1</sup> Rizki Hazira<sup>2</sup> Novia Mutiara<sup>3</sup> Rosmaida Sinaga<sup>4</sup>

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,  
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [rfadilla797@gmail.com](mailto:rfadilla797@gmail.com)<sup>1</sup> [hazirahazira374@gmail.com](mailto:hazirahazira374@gmail.com)<sup>2</sup> [mnovia206@gmail.com](mailto:mnovia206@gmail.com)<sup>3</sup>  
[rosmaidasinaga@unimed.ac.id](mailto:rosmaidasinaga@unimed.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas kebijakan kolonial yang diterapkan oleh Van den Bosch dan Thomas Stamford Raffles di Indonesia, serta dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat lokal. Van den Bosch, dengan sistem *Cultuurstelsel* atau Tanam Paksa, berupaya mengatasi krisis keuangan Belanda melalui eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja di Jawa. Sementara itu, Raffles memperkenalkan reformasi yang lebih liberal, seperti penghapusan monopoli dan penerapan sistem sewa tanah. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua kebijakan bertujuan meningkatkan pendapatan kolonial, dampaknya terhadap masyarakat Indonesia sangat berbeda. Kebijakan Van den Bosch cenderung lebih eksploitatif dan merugikan, sedangkan kebijakan Raffles lebih mengarah pada perubahan struktural yang memberikan sedikit ruang bagi perkembangan ekonomi lokal.

**Kata Kunci:** Tanam Paksa, Sewa Tanah, Kebijakan Kolonial

### Abstract

*This study examines the colonial policies implemented by Van den Bosch and Thomas Stamford Raffles in Indonesia, as well as their impact on the local population. Van den Bosch, with the Cultuurstelsel or Forced Cultivation System, sought to address the Dutch financial crisis by exploiting resources and labor in Java. Meanwhile, Raffles introduced more liberal reforms, such as the abolition of monopolies and the implementation of a land rent system. This research employs a historical method with a descriptive-qualitative approach, collecting data from primary and secondary sources. The findings indicate that while both policies aimed to increase colonial revenues, their effects on Indonesian society were significantly different. Van den Bosch's policy was more exploitative and detrimental, while Raffles' policy led to structural changes that provided some room for local economic development.*

**Keywords:** Forced Cultivation, Land Rent, Colonial Policy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pada masa kolonialisme Belanda dan Inggris di Indonesia, dua tokoh penting yang memiliki peran besar dalam kebijakan ekonomi dan politik adalah Johannes van den Bosch dan Thomas Stamford Raffles (Poesponegoro, dkk. 1993). Keduanya merupakan tokoh yang membawa dampak besar terhadap tata kelola tanah jajahan, khususnya di Pulau Jawa. Meskipun berada di bawah kepemimpinan negara yang berbeda—Van den Bosch sebagai perwakilan Belanda dan Raffles sebagai perwakilan Inggris—kebijakan yang mereka terapkan di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk keuntungan negara mereka masing-masing. Namun, pendekatan yang mereka gunakan sangat berbeda. Van den Bosch terkenal dengan kebijakan Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*), sebuah sistem yang secara paksa memaksa rakyat Indonesia untuk menanam komoditas

ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, yang sangat menguntungkan Belanda. Sementara itu, Raffles, sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, lebih menekankan kebijakan yang dikenal sebagai sistem sewa tanah (landrent system) yang bertujuan untuk mengganti sistem feodal yang dijalankan oleh Belanda sebelumnya (Ricklefs, M.C.1991). Artikel ini bertujuan untuk membahas perbedaan dan persamaan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Van den Bosch dan Raffles, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Dengan memahami kebijakan keduanya, kita dapat lebih memahami strategi kolonial dalam mengendalikan wilayah jajahan dan bagaimana kebijakan tersebut membentuk perekonomian dan sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis kebijakan Van den Bosch dan Thomas Stamford Raffles serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Pengumpulan Data (Heuristik). Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, termasuk arsip, buku, dan jurnal terkait kebijakan Tanam Paksa Van den Bosch dan reformasi Raffles.
2. Kritik Sumber. Dilakukan kritik ekstern (mengecek keaslian sumber) dan kritik intern (menilai keandalan isi sumber) untuk memastikan kualitas data.
3. Interpretasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan kebijakan kedua tokoh, termasuk tujuan, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia, serta konteks sosial-ekonomi saat itu.
4. Penulisan Sejarah (Historiografi). Hasil interpretasi disusun secara naratif, menyoroti perbedaan dan dampak kebijakan kedua tokoh terhadap Indonesia pada masa kolonial.

Pendekatan ini membantu memahami lebih dalam pengaruh kebijakan Van den Bosch dan Raffles terhadap masyarakat dari berbagai aspek.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Van den Bosch: Sistem Tanam Paksa**

Johannes van den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830, di tengah situasi keuangan Belanda yang sangat terpuruk akibat Perang Jawa (1825–1830) dan konflik lainnya di Eropa. Untuk memulihkan perekonomian Belanda, Van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel pada tahun 1830. Kebijakan ini mewajibkan setiap desa di Jawa untuk menyisihkan 20% dari tanah pertanian mereka untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, yang hasilnya harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Tanam paksa menjadi instrumen eksploitasi besar-besaran terhadap penduduk pribumi. Banyak aturan dalam pelaksanaannya yang tidak ditegakkan secara benar, seperti pajak tanah yang tetap dikenakan pada lahan yang digunakan untuk tanam paksa. Selain itu, penduduk yang tidak memiliki tanah diharuskan bekerja di perkebunan pemerintah selama 75 hari dalam setahun. Sistem ini menyebabkan penderitaan yang besar bagi masyarakat, dengan banyaknya kegagalan panen, kelaparan, dan kematian, terutama di daerah-daerah seperti Cirebon, Demak, dan Grobogan. Namun, dari perspektif pemerintah Belanda, sistem ini berhasil meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Peningkatan ekspor hasil pertanian memberikan keuntungan besar bagi Belanda, yang kemudian digunakan untuk memulihkan ekonomi setelah periode krisis.

### **Kebijakan Thomas Stamford Raffles: Sistem Sewa Tanah**

Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Timur (1811–1816), menerapkan pendekatan berbeda dalam kebijakan ekonominya. Salah satu kebijakan penting Raffles adalah sistem sewa tanah (*landrent system*) yang bertujuan untuk menggantikan sistem feodal yang berlaku sebelumnya. Di bawah sistem ini, petani dianggap sebagai pemilik tanah yang harus membayar sewa kepada pemerintah kolonial berdasarkan jumlah produksi lahan mereka. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong petani untuk meningkatkan produksi mereka, karena petani dapat mempertahankan sebagian dari hasil panen mereka setelah membayar sewa (Dinanti, N. P. 2018). Sistem sewa tanah Raffles dirancang untuk meminimalisir peran para bangsawan lokal yang sebelumnya memiliki kekuasaan besar atas tanah dan petani di wilayah mereka. Dengan demikian, Raffles ingin menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan lebih terbuka terhadap sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, Raffles juga menghapus sistem perbudakan dan memperkenalkan berbagai reformasi sosial lainnya, seperti sistem hukum yang lebih rasional. Namun, meskipun tujuan Raffles tampak lebih manusiawi dibandingkan Van den Bosch, penerapan sistem sewa tanah ini juga menghadapi banyak masalah. Petani sering kali kesulitan membayar sewa karena kurangnya akses ke pasar dan rendahnya harga jual hasil pertanian. Pada akhirnya, kebijakan ini tidak sepenuhnya berhasil mengurangi penderitaan rakyat, dan Inggris pun hanya sempat berkuasa singkat di Indonesia sebelum Belanda kembali menguasai wilayah tersebut (Setyawan, Y. H. 2020).

### **Perbandingan Kedua Kebijakan**

Meskipun kedua kebijakan ini sama-sama bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dari tanah jajahan, pendekatan Van den Bosch dan Raffles menunjukkan perbedaan mendasar dalam hal metode dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Van den Bosch menggunakan pendekatan yang lebih represif dengan tanam paksa, yang menimbulkan penderitaan dan kemiskinan di kalangan petani. Sebaliknya, Raffles mencoba memperkenalkan sistem yang lebih liberal dan memberikan lebih banyak otonomi kepada petani, meskipun hasil akhirnya tetap tidak mampu membawa kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat. Kebijakan Van den Bosch berhasil membawa keuntungan ekonomi besar bagi Belanda, tetapi dengan biaya sosial yang sangat tinggi. Sementara itu, kebijakan Raffles lebih berorientasi pada reformasi sosial, meskipun gagal dalam memberikan dampak jangka panjang karena penguasaannya yang singkat di Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan kolonial Van den Bosch dan Thomas Stamford Raffles mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam mengelola tanah jajahan. Van den Bosch berfokus pada eksploitasi ekonomi secara langsung melalui sistem tanam paksa, sementara Raffles mencoba mereformasi sistem agraria melalui sistem sewa tanah. Namun, kedua kebijakan tersebut, meskipun berbeda dalam pelaksanaan, memiliki satu kesamaan: keduanya tetap mengutamakan kepentingan negara kolonial tanpa memperhatikan kesejahteraan jangka panjang rakyat Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Boomgard, P., Abadi, S. M., Toer, K. S., & Soesman, M. (2004). *Anak jajahan Belanda: Sejarah sosial dan ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta: Djambatan.

- Dinanti, N. P. (2018). Kebijakan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di Bengkulu Tahun 1818-1824 (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Habib, M. M. (2007). Sejarah. Jakarta: Yudhistira.
- Hasibuan, E. D., Basri, M., & Siregar, D. (2024). Situasi dan Kondisi Perlawanan Terhadap Penjajahan Belanda di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 325-329.
- Kartodirdjo, S. (1988). Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium sampai Imporium. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1990). Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme (Jilid 2). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, N. (1993). Sejarah Nasional Indonesia 3. Jakarta: Balai Perpustakaan.
- Poesponegoro, M. D. (1993). Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (1991). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setyawan, Y. H. (2020). Peran Sir Thomas Stamford Raffles Dalam Sistem Pajak Bumi di Pulau Jawa Tahun 1811-1816. *Karmawibangga: Historical Studies Journal*, 2(2), 65-76.